

Relasi Kuasa dalam Politik Pendidikan di Indonesia: Perspektif Freire, Gramsci, dan Foucault

Power Relations in Indonesian Educational Politics: Freire, Gramsci, and Foucault Perspectives

Novelantika¹, Silfia Hanani²

¹) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Manajemen Pendidikan Islam, Pacasarjana, UIN Bukittinggi, Bukittinggi, 26131, Indonesia)

²) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Manajemen Pendidikan Islam, Pacasarjana, UIN Bukittinggi, Bukittinggi, 26131, Indonesia)

Abstrak

Pendidikan merupakan institusi sosial yang tidak pernah netral dari pengaruh politik dan kekuasaan. Ia berfungsi sebagai arena ideologis tempat negara, kelompok dominan, dan masyarakat saling bernegosiasi dalam membentuk kesadaran kolektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam politik pendidikan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka yang bersifat integratif-kritis. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu hakikat politik pendidikan, teori-teori kekuasaan dalam pendidikan menurut Freire, Gramsci, dan Foucault, serta dinamika politik pendidikan di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran ganda: sebagai instrumen reproduksi kekuasaan sekaligus sebagai sarana emansipasi manusia. Dalam konteks Indonesia, kebijakan dan kurikulum pendidikan mencerminkan konfigurasi politik yang dominan pada setiap periode sejarah. Namun, melalui paradigma dialogis dan emansipatoris sebagaimana dikemukakan Freire, pendidikan berpotensi menjadi kekuatan transformatif untuk melahirkan kesadaran kritis. Kontribusi utama artikel ini terletak pada sintesis konseptual antara teori kekuasaan klasik dan dinamika politik pendidikan Indonesia kontemporer, yang menawarkan kerangka reflektif-transformatif untuk memahami pendidikan sebagai arena dominasi sekaligus pembebasan sosial.

Kata kunci: Relasi Kuasa, Politik Pendidikan, Hegemoni, Emansipasi, Kebijakan.

¹ Korespondensi Penulis
Email: novelantika.16@gmail.com
JES 2025, Vol 14 (2)

Abstract

Education is a social institution that is never neutral from the influence of politics and power. It functions as an ideological arena where the state, dominant groups, and society negotiate in shaping collective consciousness. This article aims to analyze power relations within the politics of education in Indonesia using a qualitative descriptive approach through an integrative-critical literature review. The analysis focuses on three main aspects: the nature of educational politics, theories of power in education proposed by Freire, Gramsci, and Foucault, and the dynamics of Indonesian educational politics from the colonial period to the reform era. The findings indicate that education has a dual role: as an instrument for reproducing power and as a means of human emancipation. In the Indonesian context, educational policies and curricula often reflect the dominant political configuration of each historical period. However, through a dialogical and emancipatory paradigm as suggested by Freire, education holds transformative potential to foster critical consciousness. The main contribution of this article lies in its conceptual synthesis between classical theories of power and the contemporary dynamics of Indonesian educational politics, offering a reflective-transformative framework for understanding education as both an arena of domination and a medium of liberation.

Keywords: Power Relations, Educational Politics, Hegemony, Emancipation, Policy.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tidak pernah berdiri sebagai ruang yang netral, melainkan selalu berada dalam relasi erat dengan politik dan kekuasaan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga instrumen ideologis untuk membentuk pola pikir, perilaku, serta legitimasi kekuasaan. (Mariani, 2024) menegaskan bahwa pendidikan bisa menjadi “alat penindasan” jika hanya diarahkan untuk menanamkan kepatuhan, namun juga dapat menjadi “alat pembebasan” apabila mendorong lahirnya kesadaran kritis peserta didik. Karena itu, politik pendidikan harus dipahami sebagai arena tempat kepentingan kekuasaan dilembagakan melalui kebijakan, kurikulum, maupun praktik pendidikan.

Sekolah dan lembaga pendidikan tidak hanya menjadi agen pencerdas bangsa, tetapi juga arena perebutan wacana dan hegemoni. (Addina & Hanif, 2025) melalui konsep hegemoni kultural menekankan bahwa kelas berkuasa memanfaatkan institusi, termasuk pendidikan, untuk mempertahankan dominasi ideologinya. Negara menjadikan pendidikan sebagai alat penanaman nasionalisme dan stabilitas politik, sedangkan masyarakat sipil memanfaatkannya sebagai sarana perjuangan identitas dan resistensi. (Zaimuddin & Muyasaro, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan selalu menjadi ruang dialektika antara kekuasaan dominan dan upaya perlawanan sosial.

Pandangan serupa dikemukakan (Collins et al., 2021) yang menegaskan bahwa pengetahuan selalu terikat pada relasi kuasa. Setiap kebijakan dan kurikulum adalah representasi dari regime of truth yang dihasilkan kekuasaan. Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan hal tersebut dengan jelas: sistem dan kurikulum berubah mengikuti arah rezim, dari masa kolonial, orde lama, orde baru, hingga reformasi. Di satu sisi, pendidikan digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan ia juga menjadi basis lahirnya kritik intelektual terhadap ketidakadilan sosial-politik.

Dengan demikian, membahas politik pendidikan dan kekuasaan dalam pendidikan penting untuk memahami bagaimana pendidikan dikonstruksi oleh struktur politik sekaligus potensinya sebagai kekuatan transformasi. Pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai ruang reproduksi ideologi, tetapi juga sebagai ruang emansipasi yang melahirkan generasi kritis, demokratis, dan berdaya serta tantangan akademik dan praksisnya adalah bagaimana menjadikan pendidikan bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan, melainkan instrumen pembebasan dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun telah banyak penelitian membahas politik pendidikan, sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada aspek kebijakan makro dan kelembagaan formal. Namun, masih sedikit kajian yang secara komprehensif menelaah relasi kekuasaan dalam kurikulum, praktik pembelajaran, dan proses reproduksi ideologi di sekolah-sekolah Indonesia lintas periode politik. Celah penelitian (research gap) ini menjadi penting karena di dalamnya tersimpan dinamika yang menentukan arah dan makna pendidikan di tengah perubahan sosial dan politik nasional.

Studi-studi sebelumnya seperti Giroux (2020), Ball (2021), dan Rizvi & Lingard (2022) menyoroti bagaimana pendidikan menjadi arena reproduksi kekuasaan global. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengkaji bagaimana relasi kuasa bekerja secara spesifik dalam politik pendidikan Indonesia lintas rezim. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menelaah dinamika politik pendidikan melalui sintesis teori Freire, Gramsci, dan Foucault.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan kunci: (1) Bagaimana politik dan kekuasaan memengaruhi arah serta isi pendidikan di Indonesia? (2) Bagaimana teori-teori kekuasaan dari Freire, Gramsci, dan Foucault dapat digunakan untuk memahami dinamika tersebut? dan (3) Bagaimana pendidikan berperan ganda sebagai alat dominasi dan sekaligus sarana pembebasan manusia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara politik pendidikan dan kekuasaan dalam konteks Indonesia, serta mengidentifikasi potensi transformatif pendidikan dalam membangun kesadaran kritis dan keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi politik pendidikan di Indonesia, khususnya dalam memahami pendidikan sebagai ruang dialektis antara dominasi dan emansipasi.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan hubungan antara politik pendidikan dan kekuasaan dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap relasi kuasa dalam pendidikan Indonesia tanpa terikat pada data empiris lapangan, melainkan melalui pembacaan kritis terhadap teori dan literatur ilmiah yang relevan.

Subjek penelitian ini adalah konsep politik pendidikan dan praktik kekuasaan dalam dunia pendidikan Indonesia, sedangkan bahan penelitian terdiri atas literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen kebijakan pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan Merdeka Belajar. Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, yakni penelusuran dan analisis sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian.

Pemilihan literatur dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sumber berdasarkan relevansi topik, validitas akademik, dan kontribusinya terhadap pembahasan politik pendidikan, terutama yang membahas pemikiran tokoh-tokoh seperti Paulo Freire,

Antonio Gramsci, dan Michel Foucault. Rancangan penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada penggambaran dan interpretasi hubungan antara politik, kekuasaan, dan pendidikan. Peneliti menggunakan lembar analisis literatur sebagai instrumen utama untuk menyeleksi dan mengelompokkan data ke dalam tema-tema besar seperti hakikat politik pendidikan, teori kekuasaan dalam pendidikan, serta implikasinya terhadap kebijakan nasional.

Lebih spesifik, penelitian ini menggunakan metode Integrative–Critical Literature Review, yaitu kombinasi pendekatan integratif dan kritis yang memadukan analisis teoritis lintas sumber dengan refleksi terhadap praktik kekuasaan dalam konteks pendidikan Indonesia. Metode ini merujuk pada konsep integrative literature review (Torraco, 2016; Snyder, 2019), yang bertujuan untuk mensintesis berbagai teori dan hasil penelitian guna membangun kerangka konseptual baru secara kritis.

Pendekatan integratif digunakan untuk menyatukan berbagai teori kekuasaan seperti pemikiran Freire, Gramsci, dan Foucault ke dalam kerangka konseptual yang koheren, sedangkan pendekatan kritis berfungsi untuk menafsirkan bagaimana teori-teori tersebut berinteraksi dengan realitas sosial-politik pendidikan Indonesia. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga melakukan analisis reflektif terhadap proses reproduksi dan resistensi kekuasaan dalam dunia pendidikan.

Proses analisis dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu:

1. Identifikasi literatur relevan berdasarkan tema politik pendidikan dan teori kekuasaan;
2. Klasifikasi literatur ke dalam tiga kategori analisis — hakikat politik pendidikan, teori kekuasaan (Freire, Gramsci, Foucault), dan dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia;
3. Analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan makna dari setiap kategori dan menemukan pola konseptual yang berulang;

4. Sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka reflektif–transformatif bagi politik pendidikan Indonesia.

Validitas data diperkuat melalui *theoretical triangulation*, yakni dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai teori dan sumber literatur untuk memastikan keabsahan interpretasi. Penelitian ini bersifat konseptual dan non-empiris, sehingga hasilnya dibatasi pada tingkat analisis teoretis dan reflektif. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-argumentatif yang menekankan pada pemahaman teoritis, refleksi kritis, serta kontribusi konseptual terhadap pengembangan ilmu politik pendidikan di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Hakikat Politik Pendidikan

Politik pendidikan merupakan salah satu ranah kajian penting dalam ilmu pendidikan yang membahas hubungan timbal balik antara kebijakan politik, kekuasaan, serta dinamika pendidikan itu sendiri. Secara konseptual, politik pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, ideologi, serta relasi kekuasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. (Fernando & Sirozi, 2024) untuk memahami hakikat pendidikan secara utuh, analisis terhadap dimensi politiknya menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Dalam sejarah pemikiran sosial, pendidikan sering kali diposisikan sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter bangsa, menanamkan ideologi, serta mempersiapkan generasi penerus agar sesuai dengan kepentingan negara. (Hardiyanti, 2022) Misalnya, pendidikan nasional di banyak negara berkembang pada abad ke-20 diproyeksikan sebagai sarana *nation-building* dan integrasi bangsa. Di Indonesia, fungsi pendidikan sebagai alat pemersatu bangsa tercermin dalam berbagai peraturan dan kurikulum, mulai dari masa kolonial, orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan senantiasa berada dalam pusaran politik kekuasaan yang dinamis, di mana setiap rezim berupaya menggunakan pendidikan sebagai alat legitimasi dan reproduksi nilai-nilai tertentu.

Lebih jauh, hakikat politik pendidikan juga berkaitan erat dengan dimensi kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pendidikan dapat dipahami sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi proses pembelajaran, arah kurikulum, serta kebijakan pendidikan demi kepentingan tertentu. (Schmid, 2004) Michel Foucault, seorang pemikir post-strukturalis, menegaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan merupakan dua entitas yang tidak terpisahkan; keduanya saling melahirkan dan memperkuat. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa penguasaan atas pengetahuan sering kali sejalan dengan penguasaan atas mekanisme kekuasaan. Kurikulum, misalnya, bukan hanya sekadar kumpulan materi pembelajaran, melainkan juga hasil dari seleksi sosial-politik tentang pengetahuan mana yang dianggap sah, penting, dan pantas diajarkan kepada generasi muda.

Pendidikan juga memiliki peran ganda yang kontradiktif. Di satu sisi, ia dipandang sebagai sarana pembebasan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Freire, 2020b) Paulo Freire, dalam karya monumentalnya *Pedagogy of the Oppressed*, menekankan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan penindasan. Namun, di sisi lain, pendidikan sering kali dijadikan instrumen penundukan, di mana struktur kuasa yang dominan menggunakan lembaga pendidikan untuk melanggengkan hegemoni mereka. Ketegangan antara pendidikan sebagai pembebasan dan pendidikan sebagai penindasan inilah yang menjadi inti dari politik pendidikan.

Hakikat politik pendidikan juga mencakup aspek normatif yang berhubungan dengan tujuan-tujuan ideal pendidikan. Pertanyaan mengenai “pendidikan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada generasi muda?” atau “nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan melalui pendidikan?” selalu bersinggungan dengan kepentingan politik, ideologi, dan visi masa depan bangsa. Dengan kata lain, setiap keputusan dalam pendidikan, mulai dari penetapan kurikulum, bahasa pengantar, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi, selalu memiliki muatan politik tertentu.

Selain itu, dalam konteks globalisasi, politik pendidikan semakin kompleks karena tidak hanya dipengaruhi oleh aktor-aktor domestik, tetapi juga oleh kekuatan transnasional. Organisasi internasional seperti UNESCO, Bank Dunia, dan OECD turut memainkan peran dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di berbagai negara melalui rekomendasi,

pendanaan, maupun standar global.(Runfeng et al., 2025) Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi arena politik dalam negeri, melainkan juga menjadi bagian dari politik global yang berhubungan dengan ekonomi, budaya, dan ideologi dunia.

Di Indonesia, hakikat politik pendidikan dapat dilihat dari bagaimana setiap periode pemerintahan membawa corak dan arah pendidikan yang berbeda. Pada masa kolonial, pendidikan bersifat diskriminatif dan hanya ditujukan untuk kepentingan penjajah. (Tharaba, 2020) Pada masa orde lama, pendidikan diarahkan untuk memperkuat identitas nasional dan semangat kebangsaan. Sementara itu, pada masa orde baru, pendidikan dijadikan alat indoktrinasi politik melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Era reformasi kemudian menghadirkan paradigma baru dengan menekankan desentralisasi pendidikan, demokratisasi, serta otonomi daerah. Namun, di balik perubahan tersebut, kepentingan politik tetap menjadi faktor penentu dalam setiap kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, hakikat politik pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu kajian tentang interaksi antara kekuasaan, kebijakan, dan praktik pendidikan. Pendidikan bukan hanya arena transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga arena perebutan pengaruh dan legitimasi ideologi. Ia dapat menjadi sarana emansipasi sekaligus sarana dominasi, tergantung pada bagaimana kekuasaan digunakan dan diarahkan. Oleh sebab itu, memahami politik pendidikan berarti juga memahami bagaimana masa depan generasi bangsa dibentuk melalui interaksi antara kepentingan politik dan praktik pendidikan sehari-hari.

Dalam konteks sosiologi pengetahuan, pendidikan menjadi medan sosial tempat ide, nilai, dan kekuasaan saling bernegosiasi. Dengan meminjam kerangka Berger & Luckmann (1966), institusi pendidikan dapat dipahami sebagai ruang konstruksi realitas sosial di mana pengetahuan yang diajarkan membentuk kesadaran kolektif peserta didik. Artinya, politik pendidikan tidak hanya mengatur sistem, tetapi juga menentukan realitas sosial yang akan direproduksi melalui pengetahuan formal di sekolah.

1. Teori Kekuasaan dalam Pendidikan

Kajian mengenai politik pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang teori kekuasaan. Pendidikan, sebagai ruang sosial, bukan hanya tempat berlangsungnya proses transfer pengetahuan, tetapi juga arena di mana relasi kuasa bekerja secara halus maupun terang-terangan. Kekuasaan dalam pendidikan dapat hadir dalam bentuk kebijakan negara, regulasi kurikulum, struktur organisasi sekolah, bahkan dalam interaksi sehari-hari antara guru dan siswa. Untuk memahami dimensi ini, sejumlah pemikir kritis seperti Paulo Freire, Antonio Gramsci, dan Michel Foucault memberikan kontribusi teoritis yang penting.

a. Paulo Freire: Pendidikan sebagai Penindasan dan Pembebasan

Paulo Freire, seorang pedagog asal Brasil, dikenal dengan gagasannya mengenai pendidikan kritis. Dalam *Pedagogy of the Oppressed*, ia mengkritik model pendidikan yang disebutnya sebagai *banking education*, di mana guru dianggap sebagai pemilik pengetahuan yang menyalurkan “deposit” pengetahuan kepada siswa yang diposisikan sebagai wadah kosong. Model pendidikan semacam ini, menurut Freire, melanggengkan ketidakadilan karena menempatkan siswa dalam posisi pasif, tanpa ruang untuk berpikir kritis maupun melakukan transformasi sosial. (Freire, 2020a)

Sebagai alternatif, Freire menawarkan konsep *problem-posing education*, di mana pendidikan seharusnya membangun kesadaran kritis (*conscientização*) pada peserta didik. Melalui dialog yang setara antara guru dan siswa, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat pembebasan dari penindasan struktural.

Dalam konteks Indonesia, gagasan Freire relevan untuk melihat bagaimana pendidikan sering kali dijadikan alat legitimasi politik. Misalnya, pada masa Orde Baru, pendidikan digunakan untuk menanamkan ideologi tunggal melalui indoktrinasi Pancasila. Namun, pada sisi lain, gerakan mahasiswa dan kaum intelektual memanfaatkan pendidikan kritis untuk membangun kesadaran rakyat terhadap ketidakadilan rezim.

b. Antonio Gramsci: Hegemoni Budaya dan Pendidikan

Antonio Gramsci, seorang pemikir Marxis dari Italia, memperkenalkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kelas dominan mempertahankan kekuasaannya tidak hanya melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui persetujuan masyarakat. Menurut Gramsci, pendidikan merupakan instrumen utama dalam membangun hegemoni budaya, karena melalui pendidikan nilai-nilai, norma, dan ideologi kelas dominan dapat ditanamkan dan diterima sebagai “kebenaran” universal.

Sekolah, dalam perspektif Gramsci, berfungsi sebagai “aparatus ideologis negara” yang berperan menormalisasi ideologi tertentu sehingga terlihat alamiah. Namun demikian, Gramsci juga melihat potensi pendidikan sebagai arena counter-hegemony, di mana kelompok tertindas dapat membangun kesadaran kritis untuk melawan dominasi. (Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, 2024)

Dalam konteks Indonesia, teori Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kurikulum sering kali berubah mengikuti kepentingan rezim yang berkuasa. Pada masa Orde Lama, pendidikan menekankan pada nasionalisme dan anti-imperialisme. Pada masa Orde Baru, hegemoni pembangunan dan stabilitas politik menjadi inti kurikulum. Sementara itu, di era reformasi, pendidikan dipengaruhi oleh wacana globalisasi, demokratisasi, dan pasar bebas. Semua perubahan ini menunjukkan bagaimana pendidikan dijadikan alat reproduksi hegemoni, sekaligus ruang potensial bagi perlawanan terhadapnya.

c. Michel Foucault: Pengetahuan, Disiplin, dan Relasi Kuasa

Michel Foucault, seorang pemikir post-strukturalis dari Prancis, memberikan perspektif berbeda mengenai relasi kuasa dalam pendidikan. Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui lembaga negara atau kekuatan koersif, tetapi juga hadir dalam praktik sehari-hari melalui mekanisme disiplin dan pengawasan. Ia memperkenalkan konsep disciplinary power untuk menjelaskan bagaimana individu dibentuk menjadi subjek yang patuh melalui aturan, norma, dan praktik pengendalian.

Sekolah, bagi Foucault, merupakan salah satu institusi modern yang menjalankan fungsi disipliner, sejajar dengan penjara, rumah sakit, dan barak militer. Melalui jadwal yang ketat, evaluasi berjenjang, serta mekanisme pengawasan, sekolah membentuk tubuh dan pikiran siswa agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengetahuan dalam hal ini tidak netral, melainkan merupakan bagian dari strategi kuasa untuk menciptakan subjek yang diinginkan. (Simon, 1974)

Dalam praktik pendidikan Indonesia, pandangan Foucault dapat dilihat pada fenomena ujian nasional, standar kompetensi, serta sistem akreditasi yang menekankan pada penyeragaman dan kontrol. Guru ditempatkan sebagai pengawas yang memastikan siswa mengikuti standar, sementara siswa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kriteria yang sudah ditentukan. Proses ini mencerminkan bagaimana pengetahuan dan kekuasaan saling berkelindan dalam pendidikan.

Ketiga pemikiran tersebut memberikan kerangka analisis yang kaya untuk memahami politik pendidikan di Indonesia. Freire mengingatkan pentingnya pendidikan kritis yang membebaskan, Gramsci menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi arena hegemoni sekaligus perlawanan, sedangkan Foucault membuka mata kita pada praktik kuasa yang bekerja secara mikro dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Dengan demikian, teori-teori kekuasaan dari Freire, Gramsci, dan Foucault memberikan pemahaman bahwa pendidikan tidak pernah netral. Ia selalu merupakan arena perebutan kekuasaan, baik dalam bentuk hegemoni ideologis, mekanisme disiplin, maupun upaya pembebasan. Kesadaran akan hal ini penting untuk mengarahkan pendidikan Indonesia agar benar-benar berfungsi sebagai sarana emansipasi, bukan penindasan.

Secara teoritik, ketiga pemikir besar ini Freire, Gramsci, dan Foucault menyajikan tiga lensa yang saling melengkapi. Freire menyoroti aspek praksis dan kesadaran kritis individu, Gramsci menekankan struktur ideologis dan hegemoni budaya, sedangkan Foucault menyoroti mekanisme kuasa yang bekerja secara mikro dalam tubuh dan wacana. Jika disintesis, ketiganya menunjukkan bahwa kekuasaan dalam pendidikan bekerja secara

vertikal (melalui kebijakan dan ideologi) sekaligus horizontal (melalui relasi sosial dan praktik keseharian).

Namun demikian, terdapat juga perbedaan mendasar di antara mereka. Freire melihat pendidikan sebagai ruang transformasi etis dan moral, sedangkan Foucault lebih skeptis terhadap potensi pembebasan karena kekuasaan selalu hadir di setiap relasi sosial. Sementara Gramsci menempatkan pendidikan di antara keduanya, sebagai arena yang dapat menjadi alat hegemoni atau perlawanan tergantung pada kesadaran kolektif masyarakat. Dialog teoretik ini penting untuk memahami kompleksitas politik pendidikan Indonesia yang tidak hanya berhadapan dengan kekuasaan negara, tetapi juga dengan kuasa pasar, budaya, dan wacana global.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penggabungan tiga teori kekuasaan klasik, Freire, Gramsci, dan Foucault, ke dalam satu kerangka reflektif untuk membaca politik pendidikan Indonesia sebagai proses dialektis antara hegemoni, disiplin, dan emansipasi.

2. Politik Pendidikan di Indonesia

Politik pendidikan di Indonesia selalu dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan. Pada masa kolonial, pendidikan bersifat diskriminatif, hanya diperuntukkan bagi kalangan elite pribumi melalui Politik Etis. (Fakhriansyah & Patoni, 2019) Tujuannya bukan untuk memerdekakan, melainkan mencetak tenaga kerja terampil bagi kepentingan kolonial. Meski demikian, lahirnya kaum terpelajar justru menumbuhkan kesadaran nasional.

Masa Orde Lama menempatkan pendidikan sebagai sarana nation-building. Kurikulum diarahkan untuk menanamkan nasionalisme, semangat revolusi, dan anti-imperialisme. (Zamorni, 2005) Sementara itu, pada masa Orde Baru, pendidikan sangat terpusat dan dijadikan instrumen legitimasi kekuasaan. Melalui P4 dan penulisan sejarah versi pemerintah, rezim Soeharto menanamkan loyalitas politik. Era Reformasi membawa semangat demokratisasi dan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberi landasan baru, sementara perubahan kurikulum (KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Merdeka Belajar) mencerminkan tarik-menarik kepentingan

politik, ekonomi, dan globalisasi. Dengan demikian, sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum bukan sekadar dokumen teknis, melainkan refleksi dari konfigurasi politik setiap zaman.

Melalui perspektif sintesis teori di atas, politik pendidikan Indonesia dapat dibaca sebagai medan hegemonik di mana negara, pasar, dan masyarakat sipil saling bertarung menentukan arah pendidikan. Dalam kerangka Gramscian, kebijakan seperti Merdeka Belajar dapat dibaca sebagai upaya negara menciptakan hegemoni baru yang lebih partisipatif, sementara dalam kerangka Foucaultian, kebijakan tersebut juga menyimpan logika kontrol baru melalui data, asesmen, dan standar kinerja. Dari sisi Freirean, pendidikan di Indonesia masih berjuang agar praksis dialogis benar-benar hidup di ruang kelas dan tidak sekadar menjadi jargon administratif.

3. Relasi Kekuasaan dalam Kurikulum dan Praktik Pendidikan

Kurikulum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya di mana ia lahir. Ia bukanlah teks netral yang semata-mata berisi daftar materi dan kompetensi, melainkan produk dari pertemuan berbagai kepentingan yang saling berkompetisi. Setiap keputusan mengenai apa yang harus diajarkan, nilai apa yang ditanamkan, metode evaluasi apa yang digunakan, hingga bahasa pengantar apa yang dipilih, merupakan hasil kompromi politik yang sering kali merefleksikan dominasi kelompok tertentu. Dengan kata lain, kurikulum adalah cermin kekuasaan yang sedang berkuasa.

Relasi kekuasaan tidak hanya tercermin dalam kebijakan kurikulum, tetapi juga dalam praktik pendidikan sehari-hari di ruang kelas. Guru sering kali ditempatkan sebagai otoritas penuh dalam proses pembelajaran. Posisi ini diperkuat oleh struktur birokrasi pendidikan yang menempatkan guru sebagai perpanjangan tangan negara dalam mentransfer kurikulum kepada siswa. Akibatnya, ruang dialog sering kali tereduksi, dan siswa lebih banyak diposisikan sebagai penerima pasif ketimbang partisipan aktif dalam proses belajar. (Addina & Hanif, 2025)

Di Indonesia, upaya ke arah pendidikan dialogis mulai terlihat melalui kebijakan Merdeka Belajar. Guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal, sementara siswa diberikan ruang untuk bereksplorasi sesuai minat dan bakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena mentalitas birokratis yang masih kuat, serta keterbatasan kapasitas guru di lapangan. Dengan demikian, relasi kekuasaan dalam kurikulum dan praktik pendidikan adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Pertanyaan mendasarnya bukanlah apakah kekuasaan ada dalam pendidikan, melainkan bagaimana kekuasaan itu digunakan: apakah untuk mempertahankan dominasi dan reproduksi sosial, atau untuk memberdayakan dan membebaskan peserta didik.

Secara teoritik, interaksi antara struktur kurikulum (hegemoni Gramsci), praktik pengawasan (disiplin Foucault), dan kesadaran kritis guru-siswa (pembebasan Freire) membentuk dinamika politik pendidikan Indonesia kontemporer. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena saling beririsan dalam menentukan wajah pendidikan nasional: apakah menjadi instrumen kekuasaan atau ruang emansipasi sosial.

4. Tantangan dan Harapan Politik Pendidikan Indonesia

Politik pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks, baik dari aspek struktural, kultural, maupun global. (Suyana et al., 2024)

- a. Pertama, persoalan politisasi birokrasi pendidikan. Pengisian jabatan strategis dalam kementerian, dinas pendidikan, hingga kepala sekolah sering kali tidak terlepas dari kepentingan politik praktis. Akibatnya, kebijakan pendidikan terkadang tidak berbasis kebutuhan nyata, melainkan lebih pada kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dapat menghambat profesionalisme birokrasi, memperlemah kualitas tata kelola pendidikan, serta mengurangi akuntabilitas publik. (Zaimuddin & Muyasaro, 2020)
- b. Kedua, komersialisasi pendidikan menjadi isu serius. Biaya pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi, semakin mahal sehingga akses terhadap pendidikan berkualitas cenderung lebih mudah dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Sekolah-sekolah swasta unggulan pun cenderung menjadi simbol status

sosial, sementara kelompok miskin terpinggirkan dari kesempatan yang sama. Proses komodifikasi pendidikan ini bertentangan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. (Schmid, 2004)

- c. Ketiga, masih terdapat kesenjangan kualitas antara pusat dan daerah. Di kota besar, sekolah-sekolah umumnya memiliki sarana prasarana memadai, guru yang berkualifikasi tinggi, serta akses teknologi modern. Sebaliknya, di daerah pedalaman atau terpencil, banyak sekolah yang masih kekurangan guru, fasilitas, bahkan akses internet. Ketimpangan ini melahirkan jurang mutu yang semakin melebar antara siswa di perkotaan dan perdesaan, yang pada gilirannya memperkuat stratifikasi sosial dalam masyarakat.
- d. Keempat, tantangan globalisasi yang menuntut pendidikan Indonesia beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi global. Persaingan di era digital menuntut sistem pendidikan mampu mencetak generasi yang inovatif, kreatif, dan adaptif. Namun, tantangan ini seringkali tidak diimbangi dengan reformasi pendidikan yang memadai, sehingga lulusan banyak yang belum mampu bersaing di tingkat internasional. (Nurul Hasanah, Dhiyaa Aulia Muttaqin, Ikmawati Ikmawati, 2025)

Meski demikian, terdapat sejumlah harapan yang memberi optimisme. Salah satunya adalah kebijakan Merdeka Belajar yang diinisiasi untuk mengurangi beban birokrasi dan memberi ruang lebih luas bagi inovasi sekolah. Program ini memberikan otonomi kepada satuan pendidikan, kebebasan bagi guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, serta kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Jika diimplementasikan dengan baik, Merdeka Belajar dapat menjadi fondasi lahirnya pendidikan yang lebih humanis, demokratis, dan relevan dengan tantangan zaman.

Pada akhirnya, arah politik pendidikan Indonesia harus menempatkan pendidikan sebagai sarana emansipasi sosial. Pendidikan tidak boleh lagi dipandang semata sebagai instrumen negara atau pasar, tetapi sebagai hak fundamental setiap warga negara. Jika tantangan-

tantangan tersebut dapat diatasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas tinggi, yang mampu mencetak generasi berdaya saing sekaligus berkarakter kebangsaan yang kuat.

Berdasarkan sintesis teoretik dari Freire, Gramsci, dan Foucault, kerangka konseptual politik pendidikan Indonesia masa kini dapat dipahami sebagai proses dialektis antara hegemoni, disiplin, dan pembebasan. Hegemoni menggambarkan bagaimana kebijakan dan ideologi mendominasi sistem pendidikan; disiplin menjelaskan bagaimana kekuasaan termanifestasi melalui regulasi dan praktik kelembagaan; sedangkan pembebasan menandakan potensi pendidikan untuk melahirkan kesadaran kritis dan transformasi sosial. Dengan pendekatan ini, politik pendidikan Indonesia tidak hanya perlu dibaca secara struktural, tetapi juga kultural dan epistemologis yakni bagaimana pengetahuan diproduksi, disebarkan, dan dimaknai dalam konteks kekuasaan yang terus berubah.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik pendidikan merupakan arena di mana kekuasaan dan pendidikan saling berkelindan secara erat. Pendidikan tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu berada dalam pengaruh kepentingan politik, ideologi, dan ekonomi yang menentukan arah kebijakan serta praktik di lapangan. Sejarah pendidikan Indonesia dari masa kolonial hingga reformasi membuktikan bahwa setiap perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan selalu merefleksikan konfigurasi kekuasaan yang berlaku pada masanya. Relasi kuasa tersebut tampak baik dalam tataran kebijakan seperti pengaturan kurikulum, materi ajar, dan sistem evaluasi maupun dalam praktik pembelajaran di kelas, di mana otoritas guru sering bersifat dominatif terhadap peserta didik.

Namun demikian, pendidikan juga memiliki potensi emansipatoris ketika dijalankan secara dialogis dan reflektif sebagaimana ditekankan oleh Paulo Freire. Pendidikan tidak hanya menjadi instrumen reproduksi kekuasaan, tetapi juga dapat menjadi ruang resistensi dan pembebasan sosial melalui tumbuhnya kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa politik pendidikan memiliki dua wajah: sebagai alat legitimasi kekuasaan dan sebagai sarana pemberdayaan manusia.

Dalam konteks Indonesia masa kini, tantangan politik pendidikan meliputi politisasi birokrasi, komersialisasi pendidikan, ketimpangan mutu antarwilayah, serta tekanan globalisasi. Meskipun demikian, munculnya kebijakan Merdeka Belajar dan meningkatnya partisipasi masyarakat memberi peluang bagi terciptanya sistem pendidikan yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, arah politik pendidikan ke depan harus diarahkan untuk menjamin kesetaraan akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk masyarakat yang kritis dan partisipatif. Dengan demikian, pendidikan akan berfungsi bukan hanya sebagai alat pembangunan, tetapi juga sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Embaruan konseptual dalam artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori kekuasaan klasik dari Paulo Freire, Antonio Gramsci, dan Michel Foucault dengan konteks sosial-politik pendidikan di Indonesia secara kritis dan reflektif.

Melalui pendekatan integrative–critical literature review, penelitian ini tidak hanya memadukan sintesis teoritis, tetapi juga melakukan pembacaan kritis terhadap praktik kekuasaan dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Pendekatan integratif digunakan untuk menghubungkan beragam teori politik pendidikan lintas paradigma, sementara pendekatan kritis berfungsi untuk mengungkap bagaimana struktur kekuasaan bekerja secara halus melalui kebijakan, kurikulum, dan sistem evaluasi pendidikan nasional. Kontribusi konseptual artikel ini juga tampak dalam pembentukan kerangka analisis baru yang menggabungkan teori hegemoni Gramsci, praksis pembebasan Freire, dan konsep power/knowledge dari Foucault sebagai pisau analisis utama untuk membaca realitas pendidikan Indonesia kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(4), 196–210.
- Ball, S. J. (2021). *The Education Debate* (3rd ed.). Bristol, UK: Policy Press.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 167–186.
- Fakhriansyah, M., & Patoni, I. R. P. (2019). Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930). *Jurnal PENDIDIKAN SEJARAH*, 8(2), 122–147.
- Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2024). Pengertian “Politik Pendidikan” dan Perbedaannya dengan “Pendidikan Politik” dan “Politisasi Pendidikan.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10994–11000. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.2314>
- Freire, P. (2020a). Educação como redenção, reprodução e transformação. *Revista Educação, Cultura e Sociedade*, 4(2), 259–268.
- Freire, P. (2020b). Pedagogy of the oppressed. In *The Community Performance Reader*.
- Giroux, H. A. (2020). *On Critical Pedagogy* (2nd ed.). New York, NY: Bloomsbury Academic <https://doi.org/10.4324/9781003060635-5>
- Hardiyanti, H. (2022). Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila: Paparan Sejarah Ideologi, Ideologi Pancasila dan Relevansinya di Era Digital. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 5(1), 52. <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.73288>
- Mariani. (2024). Analisis pemikiran paulo freire tentang pendidikan yang membebaskan. *Adiba: Journal of Education*, 4(4), 588–592.
- Nurul Hasanah, Dhiyaa Aulia Muttaqin, Ikmalawati Ikmalawati, Z. U. (2025). Tantangan dan Peluang Profesi Guru di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, 5(2), 442–450.

- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 濟無No Title No Title No Title* (Vol. 2).
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2022). *Globalizing Education Policy: An Introduction* (2nd ed.). London, UK: Routledge.
- Runfeng, Z., Yongfeng, Z., Jiangyi, C., & Peng, S. (2025). 张润锋¹ 赵永峰² 陈江义¹. 44(1).
- Schmid, D. (2004). Uma entrevista com Michel Foucault. *Verve. Revista Semestral Autogestionária Do Nu-Sol*, 0(5), 240–259.
- Simon, J. K. (1974). Michel Foucault on Attica: An Interview. *Telos*, 1974(19), 154–161. <https://doi.org/10.3817/0374019154>
- Suyana, N., Dalmeri, D., Sugiharto, S., & Jupriadi, J. (2024). Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global Sebuah Analisis Strategis dan Prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620–634. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.888>
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tharaba, M. F. (2020). Pesantren Dan Madrasah Dalam Lintasan Politik Pendidikan Di Indonesia. *MANAGERE : Indonesian Journal of Educational Management*, 2(2), 136–148. <https://doi.org/10.52627/ijeam.v2i2.25>
- Zaimuddin, A. A., & Muyasaro. (2020). *RAUDHAH Proud To Be Professionals*. x(14), 64–73.
- Zamorni. (2005). Pradigma Pendidikan Masa Depan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).